
PELATIHAN LITERASI DIGITAL”SEKOLAH KEBANGSAAN”BAGI PEMILIH PEMULA SEKOLAH ERENOS TANGSEL

Rose Emmaria Tarigan
Universitas Pelita Harapan

rose.tarigan@uph.edu / tariganrose@gmail.com

Abstrak

Generasi Z disebut juga *i-generation* dengan rentang usia 15-27 merupakan peserta pemilu 2024 dengan jumlah yang paling besar, dibandingkan dengan generasi milenial ataupun generasi lainnya. Generasi ini adalah generasi *digital native*, yang menggunakan teknologi informasi dan waktu yang mereka habiskan kurang lebih 8,5 jam setiap harinya. Mereka pengguna semua media digital dengan beragam platformnya yang mereka jadikan sebagai sumber referensi politik mereka nantinya. Generasi ini memiliki sifat yang cenderung lebih, mudah dipengaruhi dan bersikap instan, membuat mereka menjadi rentan terhadap serangan isu-isu politik menjelang pemilu 2024 yang bersinggungan dengan politik identitas, politik SARA, kampanye negatif, hoaks, ujaran kebencian, sebagaimana kerap terjadi menjelang pemilihan umum. Sejumlah potensi penting mereka miliki, membuat generasi ini menjadi target dari para kontestan yang bertarung dalam pemilu 2024 nanti. Meskipun generasi Z dianggap tidak terlalu peduli kepada isu-isu politik, tetapi mereka akan berhadapan dengan politik digital yang bertujuan menjaring suara mereka. Dengan demikian sangat urgen untuk mengadakan pelatihan literasi digital bagi pemilih pemula ini. Pelatihan Literasi Digital Sekolah kebangsaan adalah pelatihan yang mempersiapkan pemilih pemula pada pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024. Hasil evaluasi pelatihan, 80 % menunjukkan siswa-siswi Sekolah Erenos mengakui mendapatkan manfaat dari pelatihan ini, khususnya dalam menentukan pilihan mereka pada saat pemilu presiden dan wakil presiden 2024.

Kata_kunci_1; Literasi Digital, Sekolah Kebangsaan, Pemilih Pemula,

PENDAHULUAN

Pemilihan umum 2024 sudah berlangsung, rakyat Indonesiapun sudah memutuskan siapa yang menjadi pemimpin pilihan mereka. Pemilihan umum merupakan ciri dari negara yang demokratis. Melalui pemilihan umum masyarakat menyalurkan aspirasi mereka (Noviona & Fitria, 2017). Sebagaimana biasanya di setiap pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia selalu memberikan gambaran yang berbeda dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum lainnya. Setiap periode pemerintahan, menciptakan suasana pesta

demokrasi yang berbeda. Misalnya, pemilu di Orde Lama berbeda dengan di masa Orde Baru dan berbeda pula dengan Orde Reformasi. Pemilu pertama yang berlangsung pada tahun 1955, dianggap sebagai pemilihan umum terbaik. Pemilu ini di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Selanjutnya pemilu yang berlangsung pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto terjadi pada tahun 1961 terdapat tiga partai, dan Partai Golkar selalu menjadi partai pemenang. Bisa dikatakan pada masa ini, kekuatan politik ada pada pemerintah. Pemilu pasca reformasi berlangsung di bawah kepemimpinan BJ Habibie, di tahun 1999

terdapat jumlah partai yang sangat banyak yakni 48 partai. Tetapi terdapat peristiwa-peristiwa yang sama, bisa dilihat dari berbagai dinamika pemilu yang terjadi khususnya perlakuan kepada para pemilih yang akan berpartisipasi pada pemilihan umum tersebut (Harruma Issha & Nada Nibras, 2022).

Ada semacam kebiasaan atau budaya yang biasanya timbul saat menjelang pemilihan umum. biasa dikenal dengan politik uang yang bentuknya beragam, mulai dari yang berbentuk uang seperti, pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*services, activities*), *club goods* (barang-barang kelompok), proyek gentong babi (*porc barrel projects*), fasilitas umum seperti pembangunan masjid, gereja, dll. Politik uang menjadi cara yang paling sering terjadi di masyarakat. Politik uang ini terjadi disebabkan berbagai faktor antara lain, sudah menjadi tradisi, lingkungan yang mendukung, hukum yang bisa dibeli, lemah iman, masyarakat miskin, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, kebudayaan (Agustino Leo, 2009). Untuk ini maka dihadirkanlah lembaga yang dikenal dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang bertugas untuk mengawasi pemilu (Noviona & Fitria, 2017). Salah satu tujuannya adalah agar pemilihan umum berlangsung dengan adil, jujur dan demokratis.

Biasanya sebelum pemilu berlangsung, rakyat pun dijadikan sebagai objek serangan fajar, suara mereka dibeli dengan rupiah demi untuk memenangkan kandidat pemimpin yang dicalonkan pada pilkada, tetapi juga dalam pemilihan umum presiden dan wakilnya. Hal ini kerap tidak bisa dihindari dan ironisnya, masyarakat pada umumnya tutup mata dengan kebiasaan tersebut. Bahkan fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena sarat dengan konflik SARA terjadi pada pemilu periode 2014 dan 2019. Pesta Demokrasi berubah menjadi ajang saling serang di mana rakyat Indonesia terpecah, terpolarisasi, bahkan kitapun sudah tidak asing dengan sebutan cebong versus kampret untuk julukan para pendukung masing-masing kandidat, selain itu ada istilah kecebonger, kampret, kampretos, buzzer, kadrun, kadal gurun yang selalu meramaikan media sosial di mana

menjadi ajang interaksi dari masyarakat. Fenomena ini, jelas tidak menggambarkan pesta demokrasi yang ideal, di mana setiap orang atau warga negara memiliki sikap menghargai dan menghormati pilihan setiap orang tanpa perlu mengaitkan dan memanipulasi perbedaan yang terdapat di masyarakat, apakah itu suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA).

Terkait penyebaran informasi, khususnya di era digital sekarang, selain teknologi menyediakan kemudahan, tetapi juga tantangan baru di mana peredaran informasi terkadang menjadi sangat tidak terkontrol dengan munculnya hoaks terutama menjelang pemilu. Pihak pemerintah seperti Bawaslu sudah melakukan usaha-usaha untuk bisa menghindarkan pemilu dari banyaknya informasi yang mengganggu seperti adanya kampanye hitam, kampanye propaganda. Untuk ini Bawaslu telah melakukan upaya yang dianggap cukup inovatif seperti mengadakan aplikasi Gowaslu untuk mempermudah pengawasan dan pelaporan kampanye propaganda yang sekaligus juga dapat diakses oleh masyarakat. Lewat Gowaslu, masyarakatpun bisa melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu, tetapi sayangnya minimnya personel bawaslu yang mengawasi sebaliknya penyebaran informasi cepat menyebarnya membuat kerja bawaslu belum maksimal (Putri & Pebrianti Ayu etc, 2024) . Oleh karena itu maka tidak bisa hanya mengandalkan kerja Bawaslu yang memiliki keterbatasan. Melakukan upaya literasi digital publik atau masyarakat menjadi pilihan yang penting untuk menyukseskan pemilu.

Fenomena lainnya yang bisa kita saksikan terutama menjelang pemilihan umum, khususnya di media sosial adalah ditemukannya banyak informasi yang masuk kategori hoaks. Hoax menurut KBBI adalah berita bohong atau informasi, kabar atau berita palsu (KBBI, 2024). Biasanya hoax ini dibuat adalah untuk menutupi berita atau informasi yang sebenarnya atau bisa juga termasuk pemutarbalikan fakta, dengan menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi. Menariknya, tidak ada satu orangpun termasuk orang yang berpendidikan yang dengan gampang bisa mengenali hoaks, kecuali mereka sudah mendapatkan penjelasan bagaimana membedakan

berita hoaks dan bukan. Penyebaran hoaks dan kampanye hitam sudah menjadi masalah yang biasa terjadi setiap menjelang pemilu sehingga diperlukan sekali ada solusi inovatif untuk mencegah dan menanggulangi masalah hoax ini (Delmana, 2024). Mudahnya peredaran hoaks salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya literasi digital dari masyarakat pada umumnya. Skor indeks literasi digital masyarakat Indonesia mencapai 3,65 dari 5 pada 2023, naik tipis dari 3,54 pada tahun sebelumnya. Khusus untuk indikator kecakapan digital, yang mengukur kemampuan warganet termasuk dalam mengecek ulang informasi yang ditemukan via internet, angkanya justru turun dari 3,52 pada 2022 menjadi 3,50 pada 2023 (Singgih, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa upaya literasi digital masyarakat menjadi sangat penting.

Tampilan berita atau informasi hoaks tidak selalu mudah memang untuk membedakannya dengan yang aslinya, karena tampilannya bisa sangat mirip dan terkesan benar. Dalam hal ini, kominfo sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat lewat websitenya. Penjelasan sederhana yang dilakukan Kominfo (2017) dengan memberikan sejumlah tips seperti; 1) Hati-hati dengan judul yang provokatif, hoax seringkali menggunakan judul yang sifatnya sensasional, 2) Cermati alamat situs, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Menurut Dewan Pers di Indonesia terdapat 43 ribu situs yang mengklaim sebagai portal berita dan yang sudah terverifikasi baru kurang lebih 300 portal. Ini menggambarkan tidak mudahnya untuk membedakan berita hoaks atau bukan hanya dengan melihat ke portal beritanya. 3) Periksa fakta, yakni dengan memperhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. 4) Check keaslian foto, kecanggihan teknologi membuat bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.

Di sini mesin pencari google digunakan untuk membuktikan keaslian dari konten dengan menggunakan drag and drop ke kolom pencarian google images. Hasil pencarian akan menunjukkan gambar yang serupa dengan yang terdapat di internet sehingga dapat dibandingkan. 5) Ikut di grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Pada grup ini kita bisa bertanya dan mengklarifikasi terkait konten yang kita curigai (Dina, 2017).

Terkait pelaksanaan pemilu, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan Pemilu). Sering sekali sebagai pemilih pemula, mereka selalu dianggap tidak memiliki pengalaman memilih. Namun, ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya, mereka tetap bisa melaksanakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Laporan KPU, yang dirilis oleh media Kompas menyebutkan bahwa jumlah pemilih untuk pemilu 2014 yang akan datang mayoritas adalah pemilih muda yakni usia 15-40 tahun. (Mantalean, 2023).

Jumlah pemilih muda dan pemilih pemula yang sangat besar mendominasi pemilih yang akan ikut berpartisipasi pada pemilu 2024 yang sudah lewat menjadikan masalah informasi terkait pemilu menjadi sangat penting karena tidak bisa dihindari media informasi seperti media sosial akan kembali memanas di mana berita bohong atau informasi palsu dan Bergeraknya para buzzer akan kembali meramaikan pesta demokrasi ini. Tetapi masalah ini tentu mengkhawatirkan kalau tingkat literasi digital para pemilih ini masih rendah. Karena mereka akan rentan terjebak dalam pusaran informasi yang tidak jelas dan pada akhirnya, mereka pun salah dalam menentukan pilihan mereka (Yunita, 2017).

Meskipun generasi Z tidak terlalu konsern dengan masalah-masalah politik tetapi mereka memiliki kebiasaan untuk menggunakan media sosial untuk mengakses informasi atau berita terkait politik. Waktu yang mereka gunakan sangat singkat kisaran 8 detik. Namun meskipun singkat generasi ini menganggap serius seperti keaslian, reputasi dan kredibilitas (Evita Nona, 2023) . Untuk itu maka sangat perlu diberikan pelatihan literasi digital sekolah kebangsaan untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait isu politik menjelang pemilu karena ada begitu banyak informasi yang palsu (*fake news*). Generasi Z menganggap serius nilai seperti keaslian, reputasi, dan kredibilitas. Temuan ini menjadi masukan agar penyelenggara dan peserta dapat mengemas informasi seputar politik dan kepemiluan dengan ringan, mengedukasi, menghibur dan tentunya memiliki visual yang menarik. Oleh karena itu maka pelatihan literasi digital ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan agar dapat memberikan kontribusi bagi program pemerintah khususnya mensukseskan pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024 yang akan datang.

Kominfo sebagai sebagai sebuah lembaga pemerintah memiliki tugas utama merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan desiminasi informasi (Kominfo) telah menghadirkan Tular Nalar. Tular Nalar adalah program yang dijalankan oleh MAFINDO bersama Ma'arif Institute dan Love Frankie, bekerjasama dengan Kominfo yang berfokus terhadap kurikulum literasi media untuk pengembangan berpikir kritis. Kominfo sejauh ini sudah menggalang jumlah yang sangat besar para pegiat literasi digital yang berasal dari beragam latar belakang untuk mensukseskan program Kominfo meliterasi masyarakat Indonesia. Sebagai hasilnya, terbukti di tahun 2022 terjadi peningkatan indeks literasi digital dimana “Hasil survei Indeks Literasi Digital Kominfo 2022 terdapat peningkatan sekitar nol koma nol lima poin. Dari sebelumnya 3,49 sekarang sudah mencapai 3,54 angka agregat. (Kominfo, Indeks Literasi Digital Tahun 2022

Meningkat, Kominfo Tetap Perhatikan Indeks Keamanan, 2023).

Pelatihan literasi digital ini adalah lanjutan dari pelatihan yang sudah kami lakukan untuk kalangan lansia dan pemilih pemula yang dikenal dengan “sekolah kebangsaan”. Kami melihat bahwa pemerintah memiliki keterbatasan untuk meliterasi masyarakat Indonesia yang tersebar di wilayah yang luas, sehingga kamu berinisiatif untuk ikut serta mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan literasi digital ini untuk pemilih pemula.

Pelatihan Literasi Digital Sekolah kebangsaan adalah pelatihan yang mempersiapkan pemilih pemula pada pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2024 yang akan datang. Pemilu sebagai pesta demokrasi sudah berlangsung berulang kali di Indonesia, dan pemilih pemula dengan jumlah yang sangat besar menjadi sangat penting untuk dipersiapkan dalam menggunakan hak politik mereka, yakni ikut memberi suara atas pemimpin yang ideal menurut pilihan mereka. Tidak dapat dipungkiri, pemilih pemula sering dijadikan sebagai sasaran perolehan suara oleh para kontestan pemilu. Dengan demikian pemilih pemula perlu diperlengkapi agar mereka dengan bebas menentukan pilihan mereka lewat informasi yang mereka dapatkan. Dalam hal ini partisipasi generasi Z menjadi sangat penting karena mencerminkan adanya kesadaran politik mereka (Mulyadi et al., 2024) . Sayangnya, ditengah gempuran berbagai informasi yang sangat banyak itu, hoaks, disinformasi beredar luas terkait pemilu, biasanya terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, atau informasi yang dipelintir dan beredar luas secara bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya dengan literasi politik maka dapat menurunkan pengaruh negatif dari hoax (Anshori, 2023).

Peredaran hoaks yang dibungkus dengan kampanye gelap tentu akan membuat para pemilih pemula mengalami kesulitan untuk bisa menentukan siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih sesuai dengan harapan dan hati nurani mereka. Untuk itu pelatihan ini perlu diadakan yang dikenal dengan “sekolah Kebangsaan” yang bertujuan untuk

membantu para pemilih pemula untuk mengetahui bagaimana mendapatkan informasi yang benar dan bagaimana agar terhindar dari informasi yang salah. Pengabdian kepada masyarakat ini akan diadakan dengan metode pelatihan. Para pemilih pemula yakni siswa-siswi SMA Erenos yang akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan informasi terkait literasi digital. Diharapkan dari pelatihan sekolah kebangsaan ini, pemilih pemula yang menjadi pesertanya akan juga bisa menjadi agen yang memberikan pemahaman yang mereka dapatkan pada pelatihan ini kepada pemilih pemula lainnya yang tidak mendapatkan pelatihan ini. Jadi dengan demikian pelatihan ini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula yang akan menggunakan hak politik mereka pada pemilihan umum 2024 yang akan datang.

Pelatihan ini dilakukan sebanyak dua kali di sekolah Erenos sebelum Pemilihan Umum berlangsung. Adapun siswa-siswi yang mengikuti pelatihan ini berjumlah 120 orang. Mereka adalah kelompok pemilih pemula yang akan ikut dalam pemilu tersebut.

METODE

Pelaksanaan PKM Sekolah Kebangsaan ini dilakukan setelah melaksanakan observasi lapangan yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena, perilaku, atau kejadian di tempat kejadian tanpa memanipulasi atau mengintervensinya. Observasi yang dilakukan adalah observasi tidak terstruktur. Observasi ini bersifat fleksibel tidak menggunakan pedoman, langsung melakukan pencatatan terhadap perilaku politik yang ditunjukkan oleh calon pemilih pemula. Peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang dianggap dapat dijadikan dasar apakah mereka memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai khalayak yang akan mendapatkan pelatihan ini.

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan selanjutnya, peneliti melakukan penelusuran sekolah mana yang memenuhi kriteria jumlah siswa

kelas sepuluhnya masuk kategori pemilih pemula. Akhirnya dari beberapa sekolah menjadi pertimbangan, maka Sekolah Erenos yang berada di Tangerang Selatan tepatnya di Pamulang, menjadi sekolah yang menjadi sasaran pelatihan ini.

Pelatihan diadakan sebanyak dua kali sebelum pemilu berlangsung, yakni di Bulan Desember dan Februari tahun 2024. Total jumlah siswa-siswi yang mendapatkan pelatihan ada sekitar 120 orang. Dari data yang diperoleh di lapangan jumlah yang termasuk usia pemilih pemula sekitar 75 % dari jumlah yang akan mengikuti pemilu atau menggunakan hak pilihnya hanya 60 % dari total siswa yang mengikuti pelatihan.

Kegiatan pelatihan ini merupakan rangkaian pelatihan yang dilakukan di seluruh Indonesia. Kegiatan pelatihan Literasi Digital “Sekolah Kebangsaan” merupakan kegiatan yang dimotori oleh Tular Nalar yang bermitra dengan Mafindo, Maarif Institute dan Love Frankie. Tular nalar melakukan berbagai pelatihan literasi digital bukan hanya di kalangan pemilih pemula tetapi juga, para lansia, UMKM dll. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia. Tular Nalar adalah bagian dari upaya Siberkreasi dalam membangun ekosistem digital yang sehat melalui program edukasi dan literasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Generasi Z masuk kategori pemilih pemula pada pemilu 2024. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang paling besar jumlahnya. Dengan demikian suara mereka menjadi penentu bagi kemenangan para kandidat pada pemilu tersebut. Berbagai upaya akan dilakukan oleh pihak yang bertarung dalam pemilihan tersebut untuk bisa merebut suara dari generasi Z ini. Dengan demikian pelatihan literasi media digital ini menjadi sangat penting diadakan untuk meningkatkan literasi digital mereka. Sehingga generasi Z ini tidak menjadi korban dari politik uang dengan beragam bentuknya, dan berbagai pembohongan publik

tentang kandidat lewat beragam berita yang timbul setiap menjelang pemilu. Lewat pelatihan ini, para pemilih mendapatkan pemahaman yang membuat mereka sadar apa yang harus mereka lakukan jika berhadapan dengan beragam informasi yang mereka terima dan bersikap tegas terhadap berbagai upaya politik uang dan mereka dapat memilih pemimpin yang ideal. Selain itu mereka pun diberikan pelatihan untuk mampu membedakan berita atau informasi yang benar. Karena menjelang pemilu media digital dengan beragam platformnya akan banyak memuat hoaks terkait pihak-pihak kandidat yang bertarung.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode pelatihan. Target siswa yang menjadi peserta mencapai 120 siswa yang



sudah berusia 16 dan akan berusia 17 pada saat pemilu 2024 yang sudah berlangsung. Metode yang digunakan adalah bentuk pelatihan

dan bukan seminar karena asumsinya, pelatihan dalam bentuk simulasi dan interaktif akan membuat peserta terlibat aktif dalam kegiatan *hands-on* yang membantu mereka mudah memahami sehingga mereka dapat implementasikan pada saat pemilu. Siswa-siswi dalam pelatihan ini di bagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 10 anak dan 1 fasilitator.

Pelatihan literasi digital “sekolah kebangsaan” ini terdiri dari 3 segmen ditambah dengan refleksi. Segmen 1. Adalah kartu Partisipasi Publik. Pada se



gmen ini peserta dalam kelompok yang didampingi satu fasilitator akan diberikan kartu yang disebut dengan kartu partisipasi publik (cue card). Adapun kartu-kartu tersebut

berisi tulisan antara lain tentang ;1)membayar Pajak, 2) Membela negara jika dikritik, 3) Berperang bela negara, 4) Memamerkan b arang mewah, 5) Melaporkan kejahatan ke polisi, 6) Membiarkan warga difabel berinteraksi di dunia digital sebisanya, 7) mematuhi hukum, 8) Menjadi anggota parpol, 9)Memilih di pemilu, 10)Menanggapi komentar atau status bernada rasis, 11) Tidak mempedulikan hoaks, 12) Memberikan donasi yang disebar di media sosial, 13) Membantu tetangga, 14) Mengutamakan produk dalam negeri.

berisi tulisan antara lain tentang ;1)membayar Pajak, 2) Membela negara jika dikritik, 3) Berperang bela negara, 4) Memamerkan b arang mewah, 5) Melaporkan kejahatan ke polisi, 6) Membiarkan warga difabel berinteraksi di dunia digital sebisanya, 7) mematuhi hukum, 8) Menjadi anggota parpol, 9)Memilih di pemilu, 10)Menanggapi komentar atau status bernada rasis, 11) Tidak mempedulikan hoaks, 12) Memberikan donasi yang disebar di media sosial, 13) Membantu tetangga, 14) Mengutamakan produk dalam negeri.

Segmen 2 tentang memilih pemimpin ideal kamu dan resiko kalau salah dalam memilih pemimpin. Pada segmen ini siswa siswi yang sudah berada dalam kelompok diberikan diberikan sejumlah kartu oleh fasilitator yang berada di kelompok. Adapun kartu-kartu yang dibagikan berisikan gambar pemimpin yang ideal. Selanjutnya siswa diminta untuk memilih salah satu.



Jadi masing-masing siswa dalam kelompok memiliki satu gambar. Peserta diminta memandang dan gambar dan memberikan opininya tentang gambar tersebut. Selanjutnya peserta mengklasifikasi kartu dan mendiskusikan pilihan mereka. Selanjutnya masing-masing kelompok dengan perwakilannya menyampaikan pandangannya dalam kelompok besar.

Setelah diskusi berlangsung, maka siswa - siswi yang mengikuti pelatihan akan tahu pemimpin seperti apa yang ideal yang mereka akan pilih pada saat pemilu. Adapun jenis-jenis pemimpin yang ditawarkan pada gambar antara lain; 1)professional, 2)kemampuan komunikasi publik, 3)beriman soleh, 4) cerdas, berwibawa, bertanggung jawab, 5)jujur dan dapat dipercaya, 6) ramah dan terkenal, dan 7)mengutamakan kepentingan umum dll.

Segmen 3; Periksa fakta sendiri, mengapa tidak. Pada segmen ini, fasilitator akan meminta setiap peserta mengambil kertas berisi gambar dari lembar *gim* dan *cue*, selanjutnya membuka diskusi dengan meminta setiap peserta bercerita tentang kertas yang diterimanya. Merekapun diminta memberi penilaian dari peserta apakah itu hoaks atau bukan. Merekapun diminta untuk mengidentifikasinya. Pesertapun melakukan seperti apa yang diminta oleh fasilitator, mengambil gambar, menebak gambar apakah hoaks atau bukan, selanjutnya mendiskusikannya. Setelah diskusi selesai, fasilitator kemudian mengajukan dua pertanyaan, 1) Apakah bisa periksa fakta atau cek kebenaran suatu informasi dilakukan sendiri? 2) Sudahkah mengenal tools atau aplikasi untuk melakukan cek fakta secara mandiri? Peserta akan memberikan tanggapan dan mengutarakan opini. Setelah diskusi berlangsung. Di bagian akhir fasilitator memberikan sejumlah tools cek fakta mandiri. Tujuannya agar peserta pelatihan bisa menggunakan untuk memastikan apakah informasi yang mereka terima terkait pemilu benar atau hoaks. Tools yang diberikan antara lain : Chatbot Kalimasada, Aplikasi hoax buster tools, <http://cekfakta.com>, <http://turnbackhoax.id>, dan *Google reverse image*.

Dengan metode pelatihan, ternyata para peserta pelatihan merasa sangat senang karena mereka langsung dan bebas memberikan opini mereka terkait masalah yang di bahas. Ternyata generasi Z memiliki perhatian terhadap perpolitikan di Indonesia terbukti dari pendapat-pendapat yang mereka sampaikan pada saat diskusi. Mereka sangat concern terhadap kredibilitas, integritas dan kompetensi dari pemimpin yang akan mereka pilih pada saat pemilu. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya generasi Z memiliki karakteristik tidak terlalu concern dengan masalah politik tetapi mereka concern dengan kualitas pemimpin. Ini dibuktikan hasil evaluasi yang dilakukan setelah pelatihan dilaksanakan. Hasil evaluasinya menunjukkan bahwa hampir 80 persen peserta menyatakan memperoleh pengetahuan tentang

bagaimana membedakan informasi fake, hoaks dan yang asli serta mereka juga mendapat pencerahan terkait pemimpin ideal seperti apa yang akan mereka pilih di saat pemilu.

Dengan demikian, pelatihan ini membuahkan hasil yang sangat baik karena mencapai apa yang menjadi target dari pelatihan ini. Di mana diharapkan generasi Z selain bisa memilih pemimpin yang ideal mereka pun memiliki kecakapan dalam menggunakan tools untuk bisa membedakan berita benar atau bohong (hoaks).

KESIMPULAN

Pemilihan Umum adalah ciri dari negara yang bersifat demokratis. Namun Pemilihan umum yang sudah berlangsung beberapa kali di Indonesia, pada umumnya masih jauh dari nilai-nilai yang bersifat demokratis, seperti adil, jujur, terbuka dan mencerminkan kehendak rakyat. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi telah membawa kita ke era digital. Masyarakatpun dituntut terliterasi secara digital, karena kalau tidak maka masyarakat akan menjadi korban dari banyaknya informasi bohong, (*fake news*) yang begitu luas beredar di masyarakat. Hal ini tentu berimplikasi kepada proses demokrasi yang akan berlangsung.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan pemilu yang adil, jujur dan transparan tetapi tentu saja pemerintah memiliki keterbatasan. Salah satu tergetnya adalah kelompok generasi Z yang jumlahnya paling banyak yang akan menggunakan haknya pada pemilu tersebut. Untuk itu lewat PKM Literasi Digital “Sekolah Kebangsaan” melakukan pelatihan kepada siswa-siswi Sekolah Erenos sebanyak 2 kali sebelum pemilu berlangsung. Terdapat 120 siswa-siswi yang mengikuti pelatihan yang masing-masing pelatihan terdiri dari tiga segmen pelatihan. Sebagai hasilnya adalah 80 persen dari mahasiswa yang hadir mengakui mendapatkan manfaat dari pelatihan ini. Mereka tidak hanya tahu bagaimana membedakan berita yang benar dan salah dengan menggunakan

beragam tools yang diperkenalkan, tetapi juga mereka pun mengetahui ciri pemimpin seperti apa yang ideal yang akan mereka akan pilih pada saat mereka menggunakan hak pilih mereka pada pemilu yang sudah berlangsung.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Sekolah Erenos Pamulang yang sudah memberikan kesempatan kepada Tim PKM untuk melaksanakan Pelatihan Literasi Digital “Sekolah Kebangsaan” ini. Terimakasih juga kepada Japelidi (Jaringan Pegiat Literasi Digital) dan juga Tular Nalar (<https://tularnalar.id/tentang-kami/>) yang telah memberi kesempatan kepada Tim PKM ini untuk melaksanakan salah satu Tri Darma yakni Pengabdian Kepada Masyarakat.

REFERENSI

- Agustino Leo. (2009). *Pilkada dan dinamika politik lokal*. Pustaka Pelajar.
- Anshori, A. (2023). Dampak Literasi Politik dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula terhadap Pengendalian Informasi Hoax. *Jurnal Audiens*, 4.
- Delmana, P. D. (2024). Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis. *Electoral Governance*, 4. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/825>
- Dina, S. (2017, November). *Cara Cerdas Pencegahan Penyebaran Hoax DI Medsos*. Kominfo.
- Evita Nona. (2023). Generasi Z Dalam Pemilu: Pola Bermedia Generasi Z Dalam Pencarian Informasi Politik. *Electoral Governance*, 5. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1051>
- Harruma Issha, & Nada Nibras. (2022, April). Perbedaan Pemilu Orde Baru dan Masa Kini. *Kompas.Com*.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/01300001/perbedaan-pemilu-orde-baru-dan-masa-kini>

- KBBI. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/HOAKS>
- Mulyadi, D., Lananda Ardelia, & etc. (2024). Pengaruh Media Massa Terhadap Generasi Z Sebagai Partisipasi Pemilu 2024 : Di Tinjau Dari Teori Demokrasi. *Rio Law Jurnal*. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1311>
- Noviona, H., & Fitria, I. (2017). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 5.
- Putri, L., & Pebrianti Ayu etc. (2024). Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, 9. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/21741>
- Singgih, V. (2024, March 31). Mengapa Hoaks Ada dan Berlipat Ganda, Menunggangi Pandemi, Perang, dan Pilpres? *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgevlr1p4n1o>
- Yunita. (2017, January). *Ini Cara Mengatasi Berita “Hoax” di Dunia Maya*. Kominfo. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan_media

